STUDI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TINGKAT KEPENTINGAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA PUBLIK (RTP) YANG AKSESSIBEL BAGI MASYARAKAT *DIFABEL*

(Studi Kasus : Alun-Alun Utara Solo)

TUGAS AKHIR

Oleh
KUKUH DESTANTO
L2D000432



JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2004

ABSTRAK

Masyarakat difabel merupakan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan masyarakat normal baik secara fisik maupun mental. Sedangkan penyediaan ruang terbuka publik yang aksessibel bagi masyarakat difabel merupakan suatu pendekatan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakat difabel sekaligus juga memenuhi kebutuhan pengguna lain secara umum.Kawasan Alun-alun Utara Solo merupakan salah satu ruang publik di Kota Solo yang mengalami permasalahan terkait dengan universalitas ruang terbuka publik. Kawasan Alun-alun Utara Solo dirasakan masih kurang aksessibel bagi masyarakat terutama bagi masyarakat dengan kemampuan yang berbeda dengan masyarakat normal (difabel) yang disebabkan oleh perancangan kawasan yang masih bersifat antropometris pada skala manusia normal saja, serta disebabkan adanya permasalahan yang ditimbulkan oleh aktivitas yang terjadi pada kawasan Alun-alun tersebut. Hal tersebut yang menjadikan ruang terbuka publik pada kawasan alun-alun utara solo menjadi kurang universal akibat tidak memperhatikan kebutuhan spesifik masyarakat difabel, sehingga menyebabkan hak masyarakat difabel untuk mengakses ruang terbuka publik menjadi hilang. Hilangnya hak masyarakat difabel terhadap aksessibilitas ruang terbuka publik tersebut juga disebabkan oleh permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat difabel seperti tidak adanya public service bagi masyarakat difabel terhadap ruang terbuka publik kota serta tidak adanya kesempatan masyarakat difabel untuk memberikan persepsi dan opini mereka terhadap keberadan ruang terbuka publik yang lebih aksessibel bagi mereka

Kondisi tersebut diatas maka fokus yang disorot dalam studi ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap tingkat kepentingan penyediaan ruang terbuka publik yang aksessibel bagi masyarakat difabel pada kawasan alun-alun utara solo. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah mengkaji persepsi masyarakat terhadap tingkat kepentingan penyediaan ruang terbuka publik yang aksessibel bagi masyarakat difabel. Dari studi ini diharapkan dapat diperoleh gambaran persepsi masyarakat baik masyarakat difabel maupun non difabel terhadap tingkat kepentingan penyediaan ruang terbuka publik yang aksessibel bagi masyarakat difabel, sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi terhadap evaluasi penyediaan ruang terbuka publik yang mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan spesifik masyarakat difabel sebagai bentuk universalitas dari sebuah ruang terbuka publik.

Data-data yang digunakan dalam studi ini sebagian besar diperoleh langsung dari lapangan baik melalui pengamatan langsung maupun melalui penyebaran kuesioner yang ditujukan pada masyarakat difabel dan masyarakat non difabel. Persepsi masyarakat yang dikaji dalam studi ini merupakan persepsi masyarakat terhadap tingkat kepentingan penyediaan ruang terbuka publik yang aksessibel bagi masyarakat difabel yang didasarkan oleh karakteristik masyarakat dan ruang terbuka publik yang terdapat pada kawasan alun-alun solo yang meliputi jalan, pedestrian, area parkir, serta lapangan. Dalam studi ini digunakan teknik analisis kuantitatif yang menggunakan alat analisis diskriminan berganda dan teknik analisis kualitatif deskriptif. Analisis diskriminan berganda ini digunakan untuk mengetahui dan mengelompokan persepsi masyarakat terhadap tingkat kepentingan penyediaan ruang terbuka publik yang aksessibel bagi masyarakat difabel serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat tersebut. Sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis keterkaitan kondisi eksisting dengan persepsi masyarakat yang dihasilkan serta untuk mengetahui prioritas tingkat kepentingan penyediaan ruang terbuka publik yang aksessibel bagi masyarakat difabel.

Kesimpulan persepsi masyarakat terhadap tingkat kepentingan penyediaan ruang terbuka publik yang aksesibel bagi masyarakat difabel adalah penting untuk disediakan ruang terbuka publik yang aksessibel bagi masyarakat difabel yang ditunjukan oleh sebagian besar masyarakat (±41%) menganggap penting untuk disediakan ruang terbuka publik yang aksessibel bagi masyarakat difabel. Persepsi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat yang relatif baik terhadap permasalahan masyarakat difabel, pemahaman terhadap aksessibilitas, pemahaman terhadap ruang terbuka publik, serta tingkat pendidikan yang juga relatif tinggi. Prioritas penyediaan ruang terbuka publik yang aksessibel bagi masyarakat difabel tersebut berdasarkan persepsi masyarakat adalah penyediaan pedestrian, penyediaan jalan, penyediaan lapangan, serta penyediaan area parkir yang lebih aksessibel bagi masyarakat difabel. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyedian jalan dan pedestrian yang lebih aksessibel tersebut terkait dengan kondisi jalan dan pedestrian yang cukup buruk. Sedangkan hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan lapangan terkait dengan lokasi dan kondisi lapangan yang cukup buruk, penyediaan ramp yang masih kurang aksessibel, maupun pada interaksi sosial yang pada saat ini dianggap memiliki kesempatan yang kecil untuk terjadi interaksi sosial antar masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang terbuka publik merupakan suatu ruang terbuka milik bersama, tempat masyarakat melakukan aktivitas fungsional dan ritualnya dalam suatu ikatan komunitas baik kehidupan sehari-hari maupun dalam perayaan berkala (*Carr*, 1992 : XI). Salah satu fungsi utama ruang terbuka publik adalah sebagai wahana interaksi antar komunitas untuk berbagai tujuan, baik individu maupun kelompok. Dalam hal ini ruang terbuka publik merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat yang keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial.

Keberadaan ruang terbuka publik dewasa ini telah mengalami kemunduran fungsi terutama terhadap sifat kepublikannya. Beberapa aspek yang seharusnya terdapat pada sebuah ruang terbuka publik sering sekali dilupakan bahkan tak jarang tidak dipedulikan oleh para perencana dan perancang kota. Hal ini ditambah lagi dengan munculnya pengembangan ruang-ruang publik *kontainer* yang berupa bangunan sebagai penampung aktivitas sosial ekonomi yang pada dasarnya ruang publik tersebut tidak dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai ruang publik, universalitas merupakan aspek utama yang harus diperhatikan dalam penyediaan suatu ruang terbuka publik. Keberadaan Ruang terbuka publik harus mempertimbangkan berbagai kelas dan status kebutuhan masyarakat yang mencerminkan pemenuhan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat baik kelas atas sampai bawah, dari masyarakat normal sampai masyarakat yang memiliki kemampuan fisik berbeda dengan masyarakat normal, dari anak-anak sampai dewasa dan pria atau wanita (*Purwanta*, 2002: 15).

Masyarakat difabel berasal dari bahasa Inggris yaitu people with different abilities yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan masyarakat normal baik secara fisik maupun mental (Purwanta, 2002: 4) dan segala keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi mereka atau siapa saja untuk melakukan pembatasan sosial baik secara langsung maupun tak langsung. Pembatasan sosial ini terjadi ketika mereka para masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik telah dikelompok-kelompokan dalam yayasan penyandang cacat ataupun pada sekolah luar

biasa, dan pembatasan sosial ini semakin nyata ketika lingkungan disekitar kita, ruangruang publik kota justru menyebabkan setiap langkah kruk mereka tersandung, setiap putaran kursi roda mereka terhenti, setiap ayunan tongkat putih tunanetra mereka terganjal, dan setiap bahasa isyarat mereka tidak dipedulikan masyarakat. Istilah masyarakat difabel tidak hanya terpaku pada mereka penyandang cacat tetapi istilah difabel memiliki pengertian yang lebih luwes dan luas yaitu orang yang memiliki hambatan sementara maupun permanen dalam menjalankan keseharian mereka, termasuk di dalamnya ibu hamil, anak-anak, lanjut usia, pengguna kursi roda, kruk, tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan sebagainya. Menurut data WHO, sekitar 10 persen atau kurang lebih 23 juta dari jumlah total penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki kemampuan terbatas dan mengalami fenomena permasalahan yang hampir sama berkaitan dengan hak terhadap penyediaan ruang-ruang publik yang tidak aksessibel dan belum bisa melayani kebutuhan spesifik aktivitas mereka (Gemma, Maret 2002).

Ruang terbuka publik yang aksessibel bagi masyarakat difabel merupakan ruang terbuka publik yang memperhatikan kebutuhan spesifik masyarakat difabel yaitu ruang terbuka publik yang memenuhi persyaratan teknis aksessibilitas dan sesuai dengan akses aksessibilitas (Keputusan Menteri Pekerjan Umum No 468/KPTS/1998). Penyediaan ruang terbuka publik yang aksessibel bagi masyarakat difabel mempunyai pengertian bukan mengistimewakan masyarakat difabel dalam penyediaan ruang terbuka, tetapi penyediaan ruang terbuka tersebut merupakan suatu pendekatan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakat difabel sekaligus juga memenuhi kebutuhan pengguna lain secara umum. Hal ini lebih merujuk kepada penyediaan ruang terbuka publik yang dapat dimasuki oleh semua orang termasuk masyarakat difabel, dan masyarakat difabel tersebut dapat menikmati serta menggunakan segala fasilitas yang ada didalamnya tanpa harus menjadi objek belas kasihan orang lain.

Namun jika diamati, ruang-ruang terbuka publik kota baik itu taman, lapangan, jalan, pedestrian, dan keseluruhan *landscape* maupun *hardscape* termasuk alun-alun kota, tidak ada yang memperhatikan kebutuhan spesifik masyarakat dengan keterbatasan kemampuan tersebut. Keberadaan alun-alun sebagai salah satu ruang terbuka publik kota, tempat masyarakat beraktivitas dan berinteraksi dengan sesamanya terasa menutup diri dengan tidak adanya kesempatan bagi mereka yang mempunyai keterbatasan kemampuan untuk mengakses ruang terbuka publik di tengah kota tersebut. Dalam mewadahi aktivitas-

aktivitas yang terdapat disekitarnya, keberadaan alun-alun Solo sebagai ruang terbuka publik dapat memberikan arti tersendiri bagi semua lapisan masyarakat yang menggunakannya, baik bagi masyarakat normal maupun masyarakat yang memilki kemampuan berbeda dengan masyarakat normal (difabel). Pada dasarnya aktivitas ruang terbuka harus dilandasi oleh pemahaman terhadap keterkaitan dengan organisasi lingkungan, kelompok wanita, masyarakat minoritas termasuk pemahaman dan dukungan bagi kelompok yang lemah seperti masyarakat difabel (Van Doren, 1979:7). Hal ini menunjukan bahwa penyediaan ruang terbuka publik harus didasarkan oleh pemahaman terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pengguna ruang terbuka publik termasuk mereka yang memiliki kemampuan yang berbeda.

Pada kenyataannya, keberadaan Alun-alun Solo dirasakan masih belum bisa aksessibel bagi semua lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat difabel. Padahal alun-alun Solo yang dalam konsep jawa (Wiryomartono, 1995,34) merupakan tempat berkumpulnya manusia dari berbagai golongan, pejabat kerajaan, raja, serta rakyatnya untuk melakukan kegiatan sosial kenegaraan atau untuk kegiatan ritual keagamaan maupun untuk menyelenggarakan hiburan rakyat, terbuka bagi siapa saja yang ingin memasukinya termasuk bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan (difabel). Di Kota Solo, tingkat mobilitas masyarakat difabel pada ruang-ruang publik cukup tinggi sebesar 25-30 % dari jumlah total masyarakat difabel yang terdapat di Kota Solo (LSM Interaksi, 2003). Dari penelitian yang dilakukan oleh LSM interaksi juga menunjukan bahwa kawasan Alun-alun Solo seperti Pasar Klewer dan Masjid Agung merupakan salah satu ruang publik yang sering dikunjungi oleh masyarakat difabel. Hal ini menunjukan bahwa kawasan Alun-alun Solo merupakan salah satu ruang publik kota dengan pengunjung dari berbagai lapisan masyarakat, baik masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan (difabel) maupun masyarakat yang normal.

Konsep perancangan yang bersifat antropometris pada skala manusia normal saja dapat dilihat dari keberadaan alun-alun Solo yang tidak menyediakan fasilitas maupun pelayanan terhadap kebutuhan spesifik masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan masyarakat normal. Aktivitas publik yang terdapat disekitar kawasan alun-alun Solo seperti adanya Pasar Klewer, Masjid Agung dan maraknya PKL juga semakin menyebabkan alun-alun Solo menjadi tidak aksessibel bagi masyarakat yang memilki kemampuan yang berbeda (difabel) karena kesemrawutan dan kemacetan yang